

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTABARU KECAMATAN
KERITANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program
Studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh :

YOGA SAPRIANDI
NIM: 01870614276



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : YOGA SAPRIANDI
 NIM : 01870614276
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SISTEM
 ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
 KOTABARU KECAMATAN KERITANG

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING


MUAMMAR ALKADAFIS, Sos, M.Si,
 NIK, 130 712 075


MENGETAHUI

DEKAN


Dr. Hj. MAHYARNI, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

D3 Administrasi Perpajakan


Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YOGA SAPRIANDI
NIM : 01870614276
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA
 KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
 MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
 KOTABARU KECAMATAN KERITANG

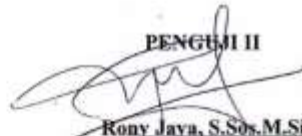
DISETUJI OLEH :
 KETUA PENGUJI


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
 NIP.19790911 201101 1003

PENGUJI I


Dr. Khairil Henry SE, M. Si, Ak
 NIP.19751129 200801 1 009

PENGUJI II


Rony Java, S.Sos, M.Si
 NIK.130717060



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YOLA SAPRIANDI
 NIM : 018 706 193 76
 Tempat/Tgl. Lahir : KOTABARU / 05 November 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial / DIII
 Prodi : DIII Peradilan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS ~~PADA~~ PENYERAPAN PAJAK KENDARAAN Bermotor (PKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA BARU KECAMATAN CERITANG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2021
 Yang membuat pernyataan



[Handwritten signature]

YOLA SAPRIANDI

NIM: 018 706 193 76

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, strategi kebijakan pemerintah dalam pencapaian target perpajakan kendaraan bermotor. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data empiris dan pemahaman yang komprehensif tentang esensi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan langsung. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data. Teknik analisis digunakan secara interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kendaraan bermotor sangat penting guna meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah juga perlu menjadikan wajib pajak menjadi wajib pajak untuk mencapai target penerimaan PAJAK. Pemahaman penelitian peraturan perpajakan ,target realisasi pajak dan upaya pemerintah merupakan tugas kita semua dalam hal pengupayaan pendapatan pajak . Objek yang kita teliti disini yakni kendaraan bermotor, Kepatuhan wajib pajak bermotor disini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kesadaran, dan moralitas pajak. Tingkat kepatuhan yang masih rendah karena peningkatan jumlah kendaraan tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan pajaknya. Pandemi ini juga membawa dampak pada penurunan penerimaan PKB dan BNN baik untuk Kabupaten Indragiri Hilir maupun Provinsi Riau. BPPD sudah mengupayakan berbagai di antaranya adalah gencarnya sosialisasi di berbagai media, penghapusan denda pajak, memperbaiki layanan dan inisiasi e-samsat

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of motorized vehicle taxpayers in Indragiri Hilir Regency, the factors that can affect motor vehicle tax compliance, the realization of motor vehicle tax revenues, government policy strategies in achieving motor vehicle taxation targets. This study was used to obtain empirical data and a comprehensive understanding of the essence of taxpayer compliance. This study uses a qualitative method. Data was collected through direct field observations. Data analysis was carried out during data collection. The analysis technique is used interactively. The results of this study indicate that the level of motor vehicle compliance is very important in increasing regional income. The government also needs to make taxpayers become taxpayers to achieve TAX revenue targets. Understanding of tax regulations research, tax realization targets and government efforts is the task of all of us in terms of tax revenue efforts. The object that we examine here is a motorized vehicle. Motorized taxpayer compliance here is influenced by factors of knowledge, awareness, and tax morality. The level of compliance is still low because the increase in the number of vehicles is not accompanied by an increase in tax revenue. This pandemic also has an impact on decreasing PKB and BNN revenues for both Indragiri Hilir Regency and Riau Province. BPPD has made various efforts, including intensive socialization in various media, abolition of tax fines, improving services and initiating e-samsat

Keywords: Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu a'laikum warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada ALLAH Subhanahu WaTa'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTABARU KECAMATAN KERITANG”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga Syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu moral maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suprih dan ayahanda Ahmad yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan dan tetesan keringatnya sehingga anaknya Yoga sapriandi dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih tidak akan cukup dalam peluh dan Doanya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan nterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta pembantu rektor yaitu Wakil Rektor I, Waki IRektor II dan Wakil Rektor III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut Ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibuk Dr.Mahyarni, S.E., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Beserta pembantu Dekan yaitu Wakil Dekan I, Wakil DekanII,dan Wakil Dekan III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Jhon Afrizal,S.HI,.M.A Selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, beserta Bapak Muslim,S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah meng-Acc Judul Penelitian penulis.
4. Bapak Khairil Henry, SE. M.Si Ak Selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
5. Bapak Muammar Alkadafi,S.Sos.,M.Si.selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan kemudahan,bantuan,arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga menyelesaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Akhir ini.

6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
7. Sahabat seperjuangan Pajak Kelas A angkatan 2018 ,beserta teman seperantauan dari tanah kelahiran.serta teman kontrakan yang selalu memberikan semangat.
8. Kepada semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat menyebut kansatu-persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ni.Semoga ALLAH SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan.Aamiin YaRabbal'Alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan Do'a yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Yoga Sapriandi
01870614276



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM SAMSAT KOTABARU KECAMATAN	
KERITANG	9
2.1 Sejarah Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang, Kelas A Badan	
Pendapatan Provinsi Riau	9
2.2 Lokasi Geografis Kantor Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang.....	11
2.3 Visi dan Misi Kantor Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang.....	11
2.4 Struktur Organisasi Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang	12
BAB III PEMBAHASAN	13
3.1 Tinjauan Teori	13
3.1.1 Dasar Hukum Pajak.....	13
3.1.2 Fungsi Pajak	15
3.1.3 Manfaat Pajak.....	15
3.1.4 Pengelompokan Pajak	16
3.1.5 Pajak Daerah	18
3.1.6 Jenis – Jenis Pajak Daerah.	19
3.2 Tinjauan Pajak Kendaraan Bermotor	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	21
3.2.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	22
3.2.3	Obyek Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
3.2.4	Subyek Pajak Kendaraan Bermotor	25
3.2.5	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
3.2.6	Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor	27
3.2.7	Dokumen Yang Digunakan Dalam Pajak Kendaraan Bermotor.....	28
3.2.8	Mekanisme atau Tata cara Pemungutan Pajak Pendaraan Bermotor	30
3.2.9	Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	31
3.2.10	Saat Terutang Dan Masa Pajak	32
3.2.11	Kepatuhan Wajib Pajak	33
3.2.12	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menurut para ahli	34
3.3	Tinjauan Praktek.....	39
3.3.1	Bagaimana Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (PKB) di samsat kotabaru kecamatan keritang.....	39
3.3.2	Faktor–Faktor Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang.....	44
3.3.3	Upaya Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang Dalam Meningkankan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	47
BAB IV PENUTUP		50
4.1	Kesimpulan.....	50
4.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi Kantor Samsat Kotabaru Kec.Keritang.....12

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keseluruhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kec. Keritang Tahun 2018-2020.....4

Tabel 3.3.1 Data Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) DI SAMSAT
Kotabaru Kecamatan keritang 2018.....40

Tabel 3.3.2 Data Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) DI SAMSAT
Kotabaru Kecamatan keritang 2019.....41

Tabel 3.3.3 Data Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) DI SAMSAT
Kotabaru Kecamatan keritang 2020.....42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor minyak dan gas yang menjadi tumpuan utama pemerintah pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an tidak bisa lagi menjadi pemain penting dalam pendapatan Negara seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan sifat dari minyak dan gas yang tidak bisa diperbaharui. Pemerintah pun mencari alternative lain yang dinilai lebih aman, yaitu pajak. Pajak terbukti memegang jajaran peran utama dalam pembangunan nasional yang bergilir pada kesejahteraan rakyat karena menduduki 70% hingga 80% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi pekerjaan rumah yang vital bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Jika pajak diklasifikasikan menurut pemungut dan pengelola, dapat kita temui dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi yang terlibat disini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Riau, Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak sehingga sangat penting untuk dioptimalkan dengan cara meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak (WP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan dalam pembahasan ini. Mardiasmo (2016:7) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai apapun yang diketahui dan dipahami dari hukum pajak materiil dan pajak formil. Pengetahuan yang mumpuni akan pajak akan meminimalisir timbulnya *tax evasion*. Pernyataan pendukung atas hal ini juga terdapat dalam Paramartha dan Rasmini (2016) bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan fiskus dari Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi faktor kunci selanjutnya. Dalam teori atribusi dijabarkan bahwa komponen luar yang memiliki pengaruh pada persepsi Wajib Pajak adalah kualitas dari pelayanan. Pelayanan yang berkualitas terbukti berpengaruh positif pada level patuh untuk membayar pajak. Tentu ini dipicu oleh rasa senang karena terlayani dengan baik. Paramartha dan Rasmini (2016) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi secara positif oleh kualitas dari layanan.

Kesadaran turut memiliki peran penting. Kesadaran Wajib Pajak berarti situasi tau, sanggup, dan mau mengerjakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Komponen dari kesadaran Wajib Pajak sendiri adalah persepsi positif akan pajak dan peningkatan pengetahuan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran rendah cenderung abai dan melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan satu fenomena dimana masyarakat yang abai mengandalkan kebijakan pemutihan denda. Hal ini tentu mendegradasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian Megawangi dan Setiawan (2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung pernyataan ini, bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi komponen kesadaran Wajib Pajak.

Pemerintah mengandalkan langkah sosialisasi untuk mengatasi hal ini. Terobosan sosialisasi yang dilakukan adalah iklan digital di berbagai media social dalam berbagai format yang interaktif. Model sosialisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk paham akan faedah pajak terlebih sanksi bagi yang melanggar.

Fenomena penghindaran pajak tersebut menjadi sinyal bahwa ada faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidak berjalan sehingga memilih abai pada kewajibannya. Sinyal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir. Terlebih pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai pajak namun masih saja banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir , puluhan kendaraan ditahan oleh instansi yang berwenang tiap razia digelar karena terbukti memiliki pajak terutang bahkan hingga beberapa tahun.artinya, Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Berikut penulis akan menyajikan data pencapaian yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018,2019 dan 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Keseluruhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kec. Keritang Tahun 2018-2020

	TAHUN		
	2018	2019	2020
WAJIB PAJAK	47394	47769	47937
JUMLAH PEMBAYAR	12402	13822	12381
JUMLAH YANG TIDAK BAYAR	35002	33947	35629

Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul;“**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTABARU KECAMATAN KERITANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah;

1. Bagaimanakah realisasi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang?
3. Apakah Upaya Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kotabaru kecamatan keritang
3. Upaya Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan mendapatkan gelar ahli madya pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bagi mahasiswa, untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akandatang.
3. Bagi kantor SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang sebagai tambahan informasi dan masukan untuk bahan pertimbangan dan penyempurnaan penerimaan pajak kendaan bermotor di Kantor SAMSAT Kotabaru Kecamatan Keritang.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi dan waktu penelitian
Penulis melakukan penelitian di Kantor SAMSAT Kotabaru kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keritang yang beralamat di jalan syekh abdurrahman yakub.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk laporan..

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

b. Dokumentasi

Pengambilan data yang berupa data dari Kantor SAMSAT kotabaru kecamatan keritang yang sesuai dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wawancara

Metode wawancara atau tanya dilakukan secara langsung dengan pegawai atau petugas pajak untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun Tugas Akhir.

4. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpul tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASIPENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/ aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak(restitusi) Pajak Pertambahan Nilai(PPN).

DAFTAR PUSTAKA


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM SAMSAT KOTABARU KECAMATAN KERITANG

2.1 Sejarah Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang, Kelas A Badan Pendapatan Provinsi Riau

Badan Pendapatan Propinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Riau.

Kantor samsat kotabaru kecamatan keritang kab.indragiri hilir berdiri pada tahun 2002 diajalan Sumatra ujung,kemudian pada tahun 2018 kantor samsat pindah ke jalan Syekh Abdurrahman ya'kub, Kantor Samsat yang pada saat itu terdiri dari pimpinan dan dua kasi. Dari ketiga kepala seksi tersebut dapat diperincikan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. STAFF
3. PAP3D
4. PAP3D



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat perkembangan dari tahun ketahun Kantor Samsat atau Kantor Pendapatan Provinsi Riau mengalami perubahan nama pada tahun 2009 menjadi “UPT” (Unit Pelaksana Teknis) Pegelolaan Pendapatan Tembilahan Kab. Inhil,Provinsi Riau.

Kantor samsat kotabaru kecamatan keritang mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban dibidang perpajakan yang berada dalam Kcamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir yaitu;

1. Kotabaru seberida
2. Kel.Kotabaru reteh
3. Kayu raja
4. Kembang mekar sari
5. Kuala keritang
6. Kuala lelang
7. Lintas utara
8. Nusantara jaya
9. Pebinaan
10. Seberang pebinaan
11. Nyiur bermain
12. Pancur
13. Pasar kembang
14. Pengalihan
15. Petalongan
16. Teluk kelasa
17. Sencalang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Lokasi Geografis Kantor Samsat Kotabaru Kecamatan Keritang

Adapun Kantor Samsat Kotabaru Kecamatan keritang terletak di Jl.Syeikh Abdurrahman Ya'kub Kotabru Seberida, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir,Provinsi Riau.

2.3 Visi dan Misi Kantor Samsat Kotabru Kecamatan Keritang

2.3.1 Visi

Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau secara profesional.

2.3.2 Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:

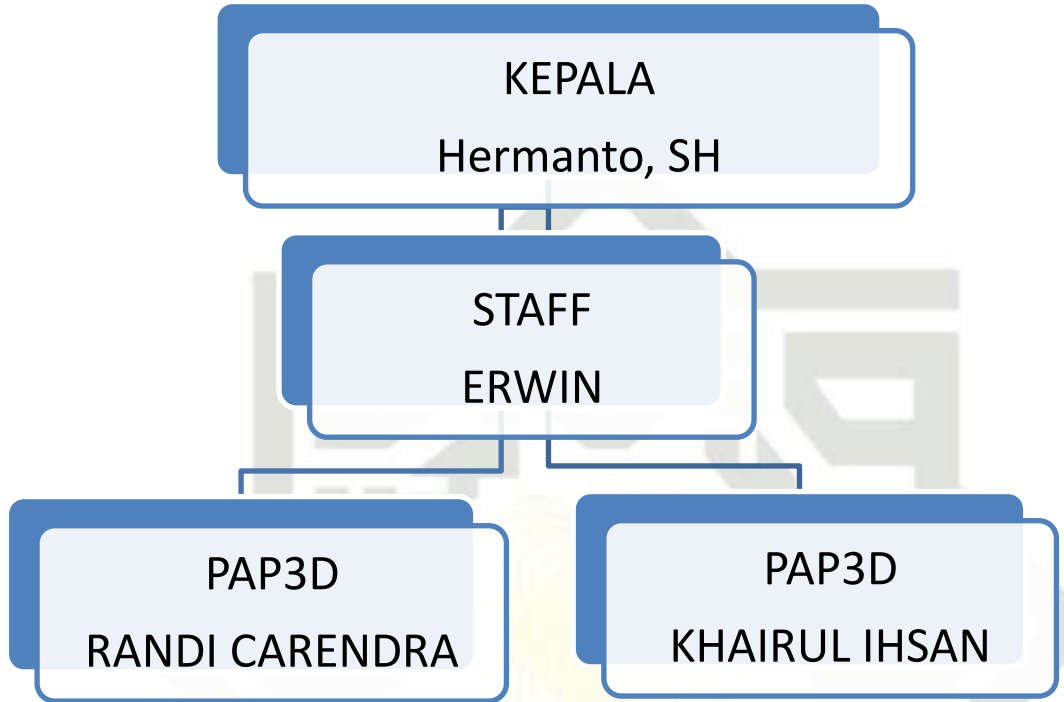
1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana penimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Struktur Organisasi Samsat Kotabaru Kecamatan Kerintang
Gambar 2.1 Struktu organisasi Kantor Samsat Kotabaru Kec.Kerintang



Sumber; Sansat Kotabaru Kec.Kerintang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari beberapa realisasi dan faktor penghambat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor (pkb) mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 3% dari tahun 2018 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 3% tentu saja ini buruk untuk pendapatan daerah keritang sehingga pemerintah harus mengatasi masalah ini agar pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa meningkat kembali, dan mengatasi beberapa faktor penghambat tersebut seperti yang terjadi di desa kayu raja yang sangat jauh dari kantor samsat kotabaru kecamatan keritang dan jalan untuk pergi ke kantor itu sangat tidak bagus apalagi disaat penghujan ini jalan nya tang masih tanah susah untuk dilewati, bukan hanya geografis tetapi faktor lain seperti dokumen yang harus asli dan masyarakat hanya mempunyai foto copy seperti ktp foto copy dikarnakan membeli motor seken dan belum mengubah bea balik nama sehingga tidak mempunyai ktp asli padahal keinginan untuk membayar pajak ada tetapi tidak terlaksana dikarnakan tidak mempunyai ktp asli, covid juga menjadi yang berpengaruh pada penerimaan pajak kendaran ditahun 2020 dikarenakan covid masyarakat merasa terbatas untuk melakukan segala hal sehingga ini mempengaruhi pendapatan, faktor terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak kendaraan bermotor tepat waktu, Seharusnya masyarakat harus sadar untuk apa pajak itu dibayar, dan nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu. Pajak kendaraan yang di pungut dari pemilik kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk pembangunan daerah yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik. Peran masyarakat sangat penting dalam pemasukan pajak tersebut Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam harus ada suatu kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Budaya sadar terhadap membayar pajak kendaraan bermotor ini sangat penting untuk dibentuk.

2. Tentunya pihak samsat/bapenda sudah menyiapkan langkah-langkah agar masyarakat mau untuk untuk membayar pajak beberapa yang dilakukan adalah:
 - a. Pengetatan sanksi / denda, beliau mengatakan setiap keterlambatan satu hari setelah jatuh tempo itu sudah terhitung sama dengan halnya satu bulan maka pajak kendaraan dikenakan denda pajak sebesar 2% perbulan.
 - b. Pemutihan/penghapusan denda, beliau mengatakan peutuhan/penghapusan denda pajak merupakan strategi oleh pemerinah provinsi guna menekan jumlah kendaraan yang tidak melapor tepat waktu, sehingga oleh pemerintah provinsi sewaktu-waktu dapat megeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak.
 - c. E-Samsat dan Samsat online Adalah pola atau metode terbaru di mana masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat untuk pembayaran pajak tahunan ini khusus untuk pajak tahunan pembayaran bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui ATM atau e-banking. Samsat Online pun juga menyediakan beberapa layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Kendaraan bermotor keadaan pengesahaan STNK 1 Tahun
2. Kendaraan bermotor keadaan tidak ganti STNK.
3. Kendaraan bermotor keadaan disertai dengan BPKB, KTP pemilik asli dan STNK.
4. Kendaraan bermotor keadaan tak terlambat lebih dari 1 Tahun.
5. Kendaraan bermotor tidak berkeadaan hilang atau rusak, lapor jual, laka dan kriminal.

Secara umum, Samsat online pun memiliki 2 manfaat, yaitu:

1. Bagi Samsat Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimana per UPT PPD maupun secara keseluruhan.
2. Bagi Wajib Pajak Memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat manapun selama 1 provinsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Untuk samsat kotabaru kecamatan keritang agar lebih mengingatkan masyarakat jika ada penghapusan denda pajak agar masyarakat tau.
2. Untuk samsat lebih memberitahu masyarakat tentang e-samsat karena masih banyak yang tidak tau tentang e-samsat.
3. Untuk masyarakat agar lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2004. Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Anonim. 2008. Undang-Undang No. 12 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2009. Undang-Undang No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Anwar, Khaeril. 2014. *Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin. Makasar.
- Aristanti Widyaningsing (2011:6), *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal akuntansi Perpajakan
- Menurut Boediono, dalam bukunya *Ni Luh* (2006:34)
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Devano, 2006, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis
- L. Wuryanto, U. Sadiati, M.N. Afif, (2019) *faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak wajib pajak dala membayar pajak kendaraan bermotor*, jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Djuanda
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi Publisher. Yogyakarta. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merani, M. M., & Susanti, L. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukabumi). *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 47-60

PERDA_NOMOR_15_TAHUN_2018_S

Pratama, Amelia Dwi, dan Hanggoro Pamungkas. 2015. *Evaluasi Penerimaan Paja Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi dan Pembedayaannya* (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Bungo 2011-2013). Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Sunandar, Andri. 2006. *Analisis Faktor -faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kulonprogo*. Skripsi FE-UII. Yogyakarta.

Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah) edisi1*. Andi. Yogyakarta.

Shifa, Viory Sabila & Yunita Anwar. 2013. *Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*” (Studi Kasus SAMSAT Jakarta Pusat). Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Resmi, Siti (2002) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.

Wade Langen, *Bohari* (2010)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Pendidikan Nomor 09 Email : tembilahandipenda@gmail.com-tembilahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/161

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Nip : Dra. Hj. NORMA DEWI, M.Si / 19641231 199303 2 025
 Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
 Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas :

Nama/Nim : Yoga Sapriandi
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan riset pada kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Kotabaru sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No.502/DPMPPT/NON IZIN RISET/31075 tentang pelaksanaan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan LTA.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 12 APRIL 2021

Kasubag Tata Usaha



Dra. NORMA DEWI, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.